

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era pemerintahan sekarang ini menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan kewenangan tersebut diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola potensi yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Sejauh ini Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Dengan rincian pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Dana Desa
2015	Rp 20,67
2016	Rp 46,98
2017	Rp 60
2018	Rp 60
2019	Rp 70

Sumber : <https://nasional.kompas.com>, diakses 13 September 2019

Selama hampir empat tahun dana desa disalurkan, desa-desa di Indonesia mampu membangun infrastruktur dalam jumlah yang besar dan masif. Pembangunan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu mereka dalam kegiatan ekonomi di desa. Hasil terbaiknya selama empat tahun

tersebut, yakni terbangunnya prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat.

Dengan rincian pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Pemanfaatan Dana Desa

Pembangunan	Jumlah
Jembatan	1.140.378 meter
Jalan Desa	191.600 kilometer
Pasar Desa	8.983 unit
BUMDesa	37.830 unit
Embung Desa	4.175 unit
Irigasi	58.931 unit

Sumber : <https://nasional.kompas.com>, diakses 13 September 2019

Dana desa juga mengurangi jumlah desa tertinggal dan desa berkembang mengalami peningkatan. Dana desa juga telah mengurangi angka ketimpangan serta kemiskinan di desa-desa. Hasil evaluasi penggunaan dana desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa dana desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya penduduk miskin pedesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017, dan adanya penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017 (<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses 14 September 2019).

Dengan anggaran dana desa yang cukup besar, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah desa juga besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan serta pengelolaan dana desa. Dimana semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa

sesuai dengan ketentuan. Masyarakat menuntut agar pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan dengan transparan dan bertanggung jawab. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, pemerintah desa pun terdorong untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif. Diperlukannya komitmen, keterbukaan, serta budaya organisasi yang baik dari pemerintah desa agar pemerintahan dapat berjalan dengan jelas, teratur, dan efektif.

Pemerintah desa sebagai kantor pelayanan publik dituntut untuk dapat melayani publik dengan baik tanpa mempersulit masyarakat. Budaya organisasi sangat berpengaruh dalam kinerja pemerintah desa, karena sistem nilai yang diterapkan di organisasi tersebut dapat mempengaruhi perilaku anggotanya dalam mencapai tujuan organisasi. Apabila budaya organisasi yang diterapkan baik maka anggota-anggota di dalam organisasi tersebut memiliki kualitas. Dalam penelitian Hariningsih, dkk (2016) penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi yang baik dan tinggi mendorong rumah sakit lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa kepada masyarakat.

Selain itu diperlukan juga komitmen yang dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi tersebut. Komitmen tersebut akan terbentuk apabila setiap individu sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tersebut tanpa melihat kedudukan dan jabatannya. Dengan komitmen dari individu maka tujuan dari organisasi akan tercapai, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota

organisasi. Dalam penelitian Hariningsih, dkk (2016) menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang baik dan tinggi mendorong rumah sakit lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penelitian Hendratami, dkk (2017) juga menunjukkan bahwa komitmen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Komitmen dari pemerintah belum tinggi, sehingga membuat kinerja yang dihasilkan belum maksimal. Dalam pengelolaan dana desa pun juga diperlukan komitmen dari pemerintah desa agar tujuan penggunaan dana desa dapat tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas sangat diperlukan sebagai pertanggungjawaban kinerja dari pemerintah desa.

Dalam pengelolaan dana desa juga diperlukannya keterbukaan dari pemerintah desa. Dimana transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi harus dibangun dengan dasar informasi yang bebas, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya. Selain itu informasi yang tersedia harus jelas dan memadai agar mudah dimengerti. Dalam penelitian Hendratami, dkk (2017). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin transparan aparatur pemerintah dalam mengelola dana anggaran publik, maka semakin baik dan besar pula pengaruhnya terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana anggaran publik. Dalam penelitian Hanafiah, dkk (2016) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengelolaan dana desa yang transparan, maka akan tercipta

pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Selain itu akuntabilitas pemerintah desa di masyarakat juga akan meningkat.

Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini akan dilakukan di 15 desa di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2018 kemarin salah satu desa di Kecamatan Mojolaban masih belum bisa mencairkan dana desa karena keterlambatan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa akibat ketidaksinkronan program kegiatan yang direncanakan pemerintah desa dengan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (<https://www.solopos.com>, diakses 14 September 2019).. Apabila APB Desa belum ditetapkan otomatis bantuan dana desa tak bisa dicairkan. Dimana para kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sukoharjo telah dibekali dan dilatih menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Para kepala desa dan perangkat desa telah dibekali pelatihan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa maupun perangkat desa bisa mengakses siskeudes untuk memonitoring besaran dana, kebutuhan dana serta capaian kegiatan fisik (<https://www.solopos.com>, diakses 14 September 2019). Diperlukannya peran serta dari kepala desa dan aparatur pemerintah desa dalam penyusunan hingga pengelolaan dana desa. Dimana wacana mengenai *good governance* pada pemerintah desa sangat diinginkan oleh masyarakat. Dengan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Dengan penjelasan diatas penulis ingin mengetahui bagaimana budaya organisasi, komitmen organisasi, dan transparansi pemerintah desa di Kecamatan Mojolaban

dalam mengelola dana desa. Dengan budaya organisasi, komitmen organisasi, dan transparansi yang sudah berlangsung apakah pengelolaan dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pemerintah desa memiliki peranan yang besar dalam menyejahterakan masyarakat desanya. Dengan adanya dana desa pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola potensi yang ada. Diperlukannya budaya organisasi, komitmen organisasi, dan transparansi dalam menjalankan pengelolaan dana desa tersebut. dimana dalam mengelola dana desa, diperlukannya akuntabilitas dari pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dari permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah budaya organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah transparansi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang akan hendak dicapai dari penelitian ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa pada 15 desa di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pemerintahan desa yang baik, efektif, dan efisien dalam pelayanan terhadap masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi pemerintah desa bahwa diperlukannya budaya organisasi, komitmen serta transparansi dari pemerintah desa agar pemerintahan tersebut berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir dari bab 1 adalah sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori

Bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang digunakan sebagai dasar teori yang akan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini yaitu teori pemerintah desa, kinerja, teori budaya organisasi, teori komitmen organisasi, teori transparansi, teori akuntabilitas pengelolaan, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan tentang metodologi yang akan digunakan didalam penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari lingkup penelitian, metode *sampling* dan Teknik pengumpulan data, metode pengukuran data, definisi operasional, metode pengujian instrument, metode analisis data, uji hipotesis,

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang analisis dan pengujian terhadap kewajiban responden yang diberikan melalui kuesioner yang telah dibagikan dan hasil yang diperoleh dalam penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Saran dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan untuk kelemahan penelitian, agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik.

